

# **PENGARUH SHARIA GOVERNANCE STRUCTURE TERHADAP PENGUNGKAPAN CSR BERDASARKAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEX**

**Rimi Gusliana Mais<sup>1</sup>, Nuning Lufian<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jl. Kayu Jati Raya No. 11A, Rawamangun – Jakarta 13220, Indonesia

[rimigusliana@gmail.com](mailto:rimigusliana@gmail.com)<sup>1</sup>, [nuning.lufiani@gmail.com](mailto:nuning.lufiani@gmail.com)<sup>2</sup>

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to determine the effect of Shari'a Governance Structures with the disclosure level of Corporate Social Responsibility in Islamic banking in Indonesia. The related factors of Shari'a Governance Structures tested in this research are the supervising mechanism and ownership structure. The supervising mechanism is represented by the existence of the Sharia Supervisory Board measured using the Islamic Governance Score (IG-Score). While the ownership structure is measured using the ratio of temporary syirkah funds (Investment Account Holders) and company size. In addition, this research also analyzes the disclosure level of CSR of Islamic Banking in Indonesia based on the ISR index. The sample was determined by purposive sampling method that Islamic Banking in Indonesia for year 2011 – 2015, with a total sample of 11 Islamic banking for a total observation in this study a total of 55 observations. The data used in this research is secondary data, in the form of financial report and annual reports that downloaded via the official website BI: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). and site of each banks. Data were analyzed using pooled data regression that processed using Eviews version 7.0 software. ISR value obtained by analyzing each company's annual report is based on content analysis. The results show that the Investment Account Holders (IAH) has a positive and significant effect on CSR disclosure. However, the existence of the Shari'a Supervisory Board (SSB) and company size has no significant effect on the level of CSR disclosure in Islamic Banking in Indonesia.*

**Keywords:** *Sharia Governance Structure, IG-Score, Investment Account Holder, Size, Islamic Social Reporting*

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan jaman yang membawa kemajuan pesat dalam dunia industri menyebabkan meningkatnya kemampuan perusahaan dalam mengeksplorasi alam. Namun, tindakan perusahaan terkadang di luar batas dapat membuat kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait tanggung jawab sosial perusahaan sangat diperlukan guna mengontrol setiap perilaku serta tindakan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wujud kepedulian sebuah perusahaan terhadap lingkungannya yang diharapkan dapat menopang kemandirian sosial ke masyarakat luas.

Jika kita melihat beberapa negara lain di dunia, Indonesia terbilang masih baru dalam penerapan undang-undang yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Dijabarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, mewajibkan perseroan yang bergerak di bidang dan/atau terkait dengan bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut pada Laporan Tahunan.

Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, terdapat beberapa alasan lain yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan CSR. Penelitian yang dilakukan Purwitasari (2011) menjelaskan bahwa pengungkapan CSR dapat membantu perusahaan dalam memperbaiki performa keuangan, menaikkan *image* perusahaan, serta menambah daya tarik terhadap perusahaan sebagai tempat kerja yang baik, yang hingga pada akhirnya akan mempengaruhi posisi nilai tawar perusahaan di pasaran.

Pada awalnya, praktik pelaksanaan serta pelaporan CSR di Indonesia didominasi oleh perusahaan yang *go public* dan bergerak dalam sektor pertambangan atau manufaktur, hingga kemudian diikuti oleh perusahaan sektor perbankan (Fitria dan Hartanti, 2010). Dari sisi perbankan pun dibagi menjadi dua kategori yaitu perbankan konvensional dan syariah. Secara garis besar perbedaan antara dua jenis perbankan tersebut terletak pada sistem operasional kegiatannya. Pada perbankan konvensional tidak memperhatikan faktor halal-haram, riba, gharar, maysir, serta berorientasi pada pencarian keuntungan materi semata. Sedangkan pada perbankan syariah sangat memperhatikan faktor halal-haram, pemerataan kesejahteraan sosial, hingga keberkahan usaha.

Konsep CSR juga terdapat dalam ajaran Islam. Lembaga yang menjalankan bisnisnya berdasarkan syariah pada hakekatnya mendasarkan pada filosofi dasar Al Qur'an dan Sunah, sehingga menjadikan dasar bagi pelakunya dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesamanya. Oleh karenanya ikatan hubungan antara institusi dengan lingkungannya dalam konsep syariah akan lebih kuat ketimbang dalam konsep konvensional. Hal ini didasarkan pada lembaga bisnis syariah didasarkan pada dasar-dasar relijius.

Sejauh ini pengungkapan atau pelaporan CSR yang dilakukan oleh perusahaan termasuk juga perbankan dan lembaga-lembaga keuangan syariah

mayoritas masih mengacu kepada *Global Reporting Initiative Index* (Indeks GRI). Jika melihat prinsip atau pedoman GRI yang bersifat konvensional, maka kurang tepat bila digunakan sebagai tolok ukur pengungkapan CSR pada perbankan syariah. Yusuf (2010) menjelaskan bahwa konsep CSR yang berkembang di barat kemungkinan besar dipengaruhi oleh nilai-nilai etika, budaya, dan keyakinan masyarakat barat, khususnya Eropa dan Amerika.

Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial pada perusahaan-perusahaan Islam seharusnya juga mengungkapkan aspek spiritual sebagai fokus utama. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam. Haniffa (2002) mengembangkan suatu indeks pelaporan yang disebut sebagai *Islamic Social Reporting* (ISR). Penelitian untuk mengembangkan indeks pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai bagi perusahaan Islam terus dilakukan. Setelah pada tahun 2002 Haniffa mencetuskan mengenai Indeks ISR, Othman, Thani, dan Ghani (2009) juga mengembangkan indeks ISR Haniffa (2002) yang semula terdiri dari 5 tema pengungkapan menjadi 6 tema. Keenam tema tersebut adalah tema investasi dan keuangan, tata kelola organisasi, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, dan lingkungan.

Terkait konsep nilai dalam ISR, Haniffa (2002) menjelaskan bahwa Islam ingin menyelaraskan antara kegiatan ekonomi dan juga spiritual dalam menjalankan bisnis. Syariah Islam memiliki tiga dimensi yang saling berhubungan, yaitu mencari ridho Allah SWT sebagai tujuan utama dalam membangun keadilan sosial-ekonomi, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mencapai kesejahteraan hidup bersama. Sehingga, dalam menciptakan pelaporan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah Islam harus berdasarkan ketiga dimensi tersebut.

CSR juga memiliki kaitan erat dengan *good corporate governance*. Tata kelola perusahaan, terutama dalam paradigma Islam merupakan hal yang sangat penting karena memiliki kecenderungan sebagai pendorong kejujuran, integritas, keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab diantara seluruh *stakeholders* dalam sebuah organisasi. Disamping itu, *sharia governance* merupakan hal yang sangat esensial pada institusi keuangan Islam dalam membangun dan memelihara kepercayaan pemegang saham serta *stakeholder* lainnya bahwa seluruh transaksi, praktek dan kegiatan yang dijalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Farook *et al.* (2011) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor penentu pengungkapan CSR di bank-bank Islam memilih *proxy* keberadaan dewan pengawas syariah sebagai atribut pengujian yang mewakili struktur *sharia governance*. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi untuk meyakinkan investor bahwa bank-bank Islam patuh pada hukum-hukum dan prinsip-prinsip syariah.

Struktur kepemilikan juga menentukan tingkat pengawasan dan tentu saja tingkat pengungkapan. Karim (1990) seperti dikutip oleh Farook *et al.* (2011)

mengklasifikasikan tiga jenis utama dari pemegang saham bank-bank Islam: manajemen, investor Islam dan investor ekonomi. Dari ketiga kategori tersebut, segmen yang paling tertarik terhadap pelaksanaan kepatuhan bank akan hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam adalah investor Islam. Semakin besar tingkat pengawasan oleh investor Islam, semakin besar kepatuhan bank syariah terhadap melaksanakan hukum dan prinsip Islam. Oleh karena itu sejauh mana pengungkapan CSR dapat dikatakan bergantung pada tingkat pengawasan oleh kelompok investor Islam.

Pada penelitian Farook dan Lanis (2005) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada 47 Bank Syariah yang ada di 14 negara di dunia. Kondisi Sosial Politik dan *Corporate Governance* merupakan dua faktor yang diangkat dalam penelitian tersebut. Faktor Kondisi Sosial Politik terdiri dari tingkat kebebasan politik masyarakat serta proporsi masyarakat muslim, sedangkan faktor *Corporate Governance* terdiri dari Tata Kelola Islam (*Islamic Governance*) dan struktur kepemilikansaham IAH (*Investment Account Holders Right*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang cukup besar dari faktor Kondisi Sosial Politik dan *Corporate Governance* terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Sedangkan hasil penelitian Kusumastuti (2006) yang melanjutkan penelitian Farook dan Lanis (2005), memperoleh hasil bahwa hanya ada satu sub variabel *Corporate Governance*, yaitu *Islamic Governance*, yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Penelitian tersebut menggunakan studi kasus pada salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Kusumastuti menambahkan indikator manajemen risiko dalam sub variabel *Islamic Governance* sebagaimana disyaratkan dalam *Code of Best Practice for Corporate Governance in Islamic Financial Institution*. Berdasarkan fakta mengenai lemahnya implementasi *Corporate Governance* dan pentingnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

## **II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1. Sharia Enterprise Theory (SET)**

Triyuwono (2007:4) menyatakan bahwa *Sharia Enterprise Theory* (SET) tidak hanya peduli pada kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham), tetapi juga pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, SET memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas, SET meliputi Allah SWT, manusia dan alam. Allah SWT merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia.

Dengan menempatkan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung agar akuntansi syariah tetap bertujuan pada “membangkitkan

kesadaran ketuhanan” para penggunanya tetap terjamin. Konsekuensi menetapkan Allah SWT sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya *sunnatullah* sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syariah. Intinya adalah bahwa dengan *sunnatullah* ini, akuntansi syariah hanya di bangun berdasarkan pada tata-aturan atau hukum-hukum Allah SWT.

## **2.2. Teori Stakeholder(Stakeholder Theory)**

*Stakeholder* adalah semua pihak baik internal maupun eksternal yang memiliki hubungan baik bersifat mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan (Reny dan Denies, 2012). Batasan *stakeholder* tersebut di atas mengisyaratkan bahwa perusahaan hendaknya memperhatikan *stakeholder*, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan.

Teori ini menunjukkan pengaruh yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemegang saham, investor, kreditor, pemasok, hingga rekan bisnis maupun pihak eksternal perusahaan yang memiliki kepentingan. Semakin kuat posisi *stakeholders*, semakin besar pula kecenderungan perusahaan mengadaptasi diri terhadap keinginan para *stakeholders* nya (Sembiring, Rismanda, 2003). Menurut Syuhada (2012), teori *stakeholder* menjelaskan pengungkapan CSR perusahaan sebagai cara untuk berkomunikasi dengan *stakeholders*. Implikasinya adalah perusahaan akan secara sukarela melaksanakan CSR, karena pelaksanaan CSR adalah merupakan bagian dari peran perusahaan ke *stakeholders*. Teori ini jika diterapkan akan mendorong perusahaan melaksanakan CSR. Dengan pelaksanaan CSR diharapkan keinginan dari *stakeholder* dapat terakomodasi sehingga akan menghasilkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan *stakeholder* nya. Hubungan yang harmonis akan berakibat pada perusahaan dapat mencapai keberlanjutan atau kelestarian perusahaannya (*sustainability*).

## **2.3. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)**

Gray *et.al*, (1996) dalam Hadi (2011) berpendapat bahwa legitimasi merupakan “*a system-oriented view of organisation and society, permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organizations, the state, individuals and group*”. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa legitimasi merupakan sistem pengolahan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Sedangkan O'Donovan (2002) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan (*going concern*).

Dalam konteks ini CSR dipandang sebagai suatu kebijakan yang disetujui antara perusahaan dengan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah

masyarakat yang telah memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan sumber daya alam dan manusianya serta izin untuk melakukan fungsi produksinya. Jadi dalam pelaporan CSR perusahaan harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Karena itu, CSR merupakan suatu kewajiban asasi perusahaan yang tidak bersifat sukarela. Namun harus diingat bahwa izin tersebut tidaklah tetap sehingga kelangsungan hidup dan pertumbuhan dari perusahaan bergantung pada bagaimana perusahaan secara terus menerus berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan keinginan dan tuntutan dari masyarakat (Syuhada, 2012).

#### **2.4. Corporate Social Responsibility (CSR)**

Sebagai satu konsep yang menjadi populer, *Corporate Social Responsibility* (CSR) belum memiliki batasan yang sepadan. Banyak ahli, praktisi dan peneliti belum memiliki kesamaan dalam memberikan definisi. Eklington (1997) dalam bukunya yang berjudul *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business* mengemukakan bahwa perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan perhatian pada kemajuan masyarakat, khususnya komunitas sekitar (*people*), serta lingkungan hidup/bumi (*planet*), dan peningkatan kualitas perusahaan (*profit*). (Mursitama, 2011).

Definisi tersebut menunjukkan CSR merupakan satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas (Hadi, 2011).

Sementara Bowman dan Haire (1976) dalam Farook *et al.* (2005) mendefinisikan CSR secara luas sebagai “*including the concern for the impact of all of the corporation’s activities on the total welfare of society*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility merupakan suatu bentuk komitmen perusahaan untuk dapat menyelaraskan kegiatan usahanya dengan kepentingan stakeholders serta berkontribusi dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan alam di sekitar lingkungan perusahaan.

#### **2.5. Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam**

Dalam konteks ini, maka CSR dalam perspektif Islam adalah praktik bisnis yang memiliki tanggung jawab etis secara Islami. Perusahaan memasukan norma-norma agama Islam yang ditandai dengan adanya komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial di dalam operasinya. CSR dalam perspektif Islam menurut AAOIFI yaitu segala kegiatan yang dilakukan institusi finansial Islam untuk memenuhi kepentingan religius, ekonomi, hukum, etika, dan *discretionary responsibilities* sebagai lembaga finansial intermediari baik bagi individu maupun institusi. Dengan demikian, praktik bisnis dalam kerangka CSR Islami mencakup serangkaian kegiatan bisnis dalam bentuknya. Meskipun tidak dibatasi jumlah

kepemilikan barang, jasa serta profitnya, namun cara-cara untuk memperoleh dan pendayagunaannya dibatasi oleh aturan halal dan haram oleh syariah (Suharto,2010).

Islam juga memerintahkan praktik CSR pada lingkungan. Prinsip-prinsip mendasar yang membentuk filosofi kebijakan lingkungan yang dilakukan secara holistik oleh Nabi Muhammad SAW adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan di antara makhluk ciptaan Allah. Karena Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik kuantitatif maupun kualitatif (lihat QS. Al Qamar: 49) dan dalam kondisi yang seimbang (QS. Al Hadid:7). Sifat saling ketergantungan antara makhluk hidup adalah sebuah fitrah dari Allah SWT. Dari prinsip ini maka konsekuensinya adalah jika manusia merusak atau mengabaikan salah satu bagian dari ciptaan Allah SWT, maka alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan yang pada akhirnya juga akan merugikan manusia (Sharing,2010).

CSR merupakan Komitmen dan aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Persoalan bagi para pelaku usaha adalah strategi dan konsep penerapan CSR di lingkungan dan masyarakat agar tepat sasaran dan sesuai dengan *corporate business value*. Untuk itu, riset, komunikasi, *sustainable empowerment*, *sincerity* dan strategi lainnya sangat diperlukan. Agar proses keberlangsungan dakwah Islam dan tujuan menjadi *rahmatan lil aa'lamiin* dapat tercapai. Islam mengajarkan tanggung jawab agar mampu mengendalikan diri dari tindakan melampaui batas kewajaran dan kemanusiaan. Tanggung jawab ini mencakup tanggung jawab kepada Allah, kepada sesama dan lingkungannya.

## **2.6. Islamic Social Reporting (ISR)**

ISR pertama kali digagas oleh Ross Haniffa pada tahun 2002 dalam tulisannya yang berjudul "*Social Reporting Disclosure: An Islamic Perspective*". ISR lebih lanjut dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Rohana Othman, Azlan Md Thani, dan Erlane K Ghani pada tahun 2009 di Malaysia dan saat ini ISR masih terus dikembangkan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Menurut Haniffa (2002) terdapat banyak keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. ISR tidak hanya membantu pengambilan keputusan bagi pihak muslim melainkan juga untuk membantu perusahaan dalam melakukan pemenuhan kewajiban terhadap Allah dan masyarakat.

ISR adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah. Indeks ini lahir dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan AAOIFI yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing peneliti berikutnya. Secara khusus indeks ini adalah perluasan dari standar pelaporan kinerja sosial yang meliputi harapan masyarakat tidak hanya mengenai peran perusahaan dalam perekonomian, tetapi juga peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Selain itu indeks ini juga menekankan pada keadilan sosial terkait mengenai lingkungan, hak minoritas, dan karyawan (Fitria dan Hartati,

2010). Tujuan ISR adalah sebagai bentuk akuntabilitas kepada Allah SWT dan masyarakat dan meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyajikan informasi yang relevan dengan memperhatikan kebutuhan spiritual investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Indeks ISR adalah item-item pengungkapan yang digunakan sebagai indikator dalam pelaporan kinerja sosial institusi bisnis syariah. Haniffa (2002) membuat lima tema pengungkapan Indeks ISR, yaitu Tema Pendanaan dan Investasi, Tema Produk dan Jasa, Tema Karyawan, Tema Masyarakat, dan Tema Lingkungan Hidup. Kemudian dikembangkan oleh Othman et al (2009) dengan menambahkan satu tema pengungkapan yaitu tema Tata Kelola Perusahaan.

### **2.7. *Shari'ah Governance Structure***

Tata Kelola perusahaan, terutama dalam paradigma Islam merupakan hal yang sangat penting karena memiliki kecenderungan sebagai pendorong kejujuran, integritas, keterbukaan, akuntabilitas dan tanggung jawab diantara seluruh *stakeholders* dalam sebuah organisasi. Disamping itu, *sharia governance* merupakan hal yang sangat esensial pada institusi keuangan Islam dalam membangun dan memelihara kepercayaan pemegang saham serta *stakeholder* lainnya bahwa seluruh transaksi, praktek dan kegiatan yang dijalankan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Farook et al. (2011) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor penentu pengungkapan CSR di bank-bank Islam memilih *proxy* keberadaan *Sharia Supervisor Board* (SSB) atau dewan pengawas syariah sebagai atribut pengujian yang mewakili struktur *sharia governance*. Menurut pendapatnya, sejumlah bank Islam membentuk lembaga khusus pengawasan untuk membatasi perbedaan kepentingan antara investor Islam dengan pengelolaan bank syariah. Dewan pengawas Syariah (DPS) berfungsi untuk meyakinkan investor bahwa bank-bank Islam patuh pada hukum dan prinsip-prinsip syariah. Permintaan akan adanya DPS muncul akibat kebutuhan yang dirasakan untuk memastikan inovasi-inovasi yang terdapat dalam praktik perbankan termasuk dalam akuntansi terhadap prinsip-prinsip ortodoksi Islam. Namun hal ini tidak menjadikan sebuah bank Islam melaporkan kepatuhan terhadap doktrin syariah (AAOIFI, 2003). Standar AAOIFI secara eksplisit menyatakan bahwa pengawas syariah adalah dimaksudkan untuk menyelidiki sampai sejauh mana institusi keuangan menganut aturan dan prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatannya (Bakar, 2002). Karim (2005) menekankan bahwa dalam kebanyakan kasus, otoritas SSB adalah setara dengan auditor eksternal.

Karim (1990) seperti dikutip oleh Farook et al. (2011) mengklasifikan tiga jenis utama dari pemegang saham bank-bank Islam: manajemen, investor Islam dan investor ekonomi. Dari ketiga kategori tersebut, segmen yang paling tertarik terhadap pelaksanaan kepatuhan bank akan hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam adalah investor Islam. Semakin besar tingkat pengawasan oleh investor Islam, semakin besar kepatuhan Bank Islam terhadap melaksanakan hukum dan prinsip Islam. Oleh karena itu sejauh mana pengungkapan CSR dapat dikatakan

bergantung pada tingkat pengawasan oleh kelompok investor Islam. Dua faktor penentu utama dari tingkat pengawasan yang diidentifikasi dalam literature yaitu mekanisme pengawasan diwakili oleh keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang diukur dengan menggunakan *Islamic Governance Score* (IG-Score) dan struktur kepemilikan diukur dengan *Investment Account Holders* (IAH) dan ukuran perusahaan.

### **1. Islamic Governance Score (IG-Score)**

*Islamic Governance Score* (IG-Score) merupakan proksi dari karakteristik dewan pengawas syariah yang diukur dari keberadaan anggota DPS, jumlah DPS, crossmembership, latar belakang pendidikan serta pengalaman/reputasi (Farook & Lanis, 2005). Menurut Abdullah, W.A, Percy, M & Stewart, J (2011), dewan pengawas syariah dapat meningkatkan pengungkapan CSR karena dapat melakukan perbandingan pada beberapa pelaporan perusahaan sehingga dapat mengetahui pelaporan manakah yang terbaik. Fungsi utama dewan pengawas syariah yaitu mengarahkan, meninjau dan mengawasi kegiatan bank syariah serta harus memastikan bahwa bank syariah telah berjalan sesuai dengan hukum Islam. Wewenang yang dimiliki dewan pengawas syariah tersebut diyakini dapat meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah. Gompers, P., Ishii, J. and Metrick, A (2001), Hanlon, M., Rajgopal, S. and Shevlin, T (2003) mengkombinasikan beberapa variabel dari komposisi dewan pengawas syariah yang kemudian dijadikan sebagai proksi dari komposisi dewan pengawas syariah dikenal dengan g-score. Dalam penelitian ini, komposisi dewan pengawas syariah diproksikan dengan indeks *Islamic Governance Score*. Penelitian Othman, R, Thani, A, & Ghani (2009), Abdullah, W.A, Percy, M & Stewart, J (2011), dan Sudaryati (2012) mengungkapkan bahwa *Islamic Governance Score* mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : *Islamic Governance Score* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR berdasarkan *Islamic Social Reporting Index*

### **2. Investment Account Holders (IAH)**

*Investment Account Holders* (IAH) adalah salah satu unsur *corporate governance*, yaitu unsur struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan adalah bentuk kepemilikan pada lembaga perbankan yang sumbernya berasal dari dana nasabah. IAH atau nasabah menentukan tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Farook et al. 2011). Semakin banyak IAH atau nasabah maka tingkat pengawasan dan tingkat pengungkapan akan lebih luas.

*Investment Account Holders* (IAH) menentukan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan berdampak pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas. IAH lebih mungkin untuk menginvestasikan dana mereka sebagai nasabah bukan sebagai pemegang

saham karena IAH lebih tertarik pada layanan yang ditawarkan bank-bank syariah dari pada kepemilikan saham dari bank-bank syariah tersebut. Rekening di bank syariah lebih mudah diakses dari pada saham bank-bank syariah. Meskipun nasabah tidak memiliki hak suara formal, namun mereka tetap mempengaruhi tingkat pengawasan terhadap manajemen melalui pemegang saham (Archer et al. 1998 dalam Hardiyantti 2012). Hal ini disebabkan bahwa keuntungan pemegang saham ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh melalui pemanfaatan dana nasabah. Jika menjadi nasabah lebih menarik daripada menjadi pemegang saham dan sesuai dengan hukum serta prinsip Islam, maka pengaruh relative dari nasabah akan menentukan sejauh mana aktivitas bank sesuai dengan hukum-hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah serta pengaruhnya terhadap tingkat pengungkapan yang disajikan bank. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berhubungan positif dengan ukuran relative dana nasabah sebagai proporsi dari dana pemegang saham. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : *Investment Account Holders* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR berdasarkan *Islamic Social Reporting Index*

### **3. Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengukur besar kecilnya perusahaan. Ada beberapa cara pengukuran ukuran perusahaan yaitu total asset, log size, total penjualan, nilai pasar saham, total modal dan jumlah tenaga kerja. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan dinyatakan dengan natural logaritma dari total asset (log size) yang dimiliki perusahaan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui bahwa semakin besar jumlah asset yang dimiliki akan semakin besar pula tanggung jawab sosial yang harus diungkapkan.

Beberapa alasan kenapa perusahaan berskala besar perlu mengungkapkan tanggung jawab social yaitu perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar cenderung memiliki system informasi manajemen internal yang baik karena berbagai macam aktivitas yang dilakukan serta perusahaan besar mendapat tekanan social, politik dan ekonomi dari luar perusahaan.

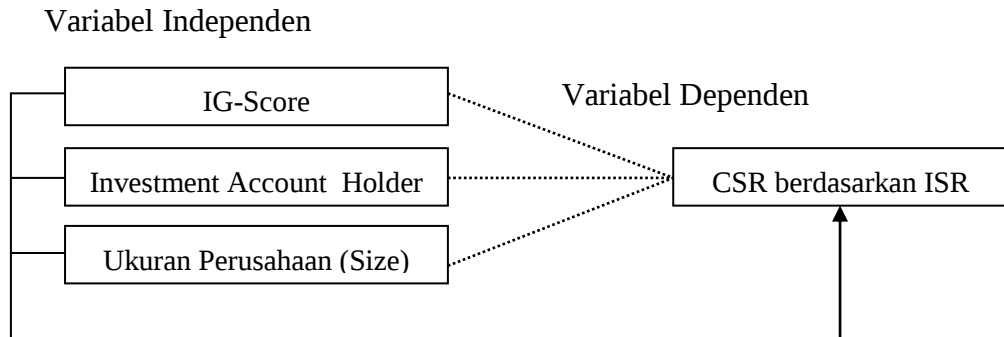
Beberapa alasan diatas menunjukkan bahwa perusahaan yang berskala besar harusnya melakukan pengungkapan tanggung jawab social yang lebih luas dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Purnomosidhi (2015) menggunakan ukuran perusahaan sebagai variable independent menyatakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan melakukan aktivitas yang lebih banyak dan memiliki banyak unit usaha sehingga menciptakan nilai perusahaan untuk jangka panjang. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>3</sub> : *Investment Account Holders* berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR berdasarkan *Islamic Social Reporting Index*

Berdasarkan uraian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah :

H<sub>4</sub> : *Islamic Governance Score (IG-Score), Investment Account Holders(IAH), dan ukuran perusahaan(size)* secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber : hasil olah penulis (2017)

Keterangan :

- .....→ = Pengaruh Parsial
- = Pengaruh Simultan

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Proses Pengumpulan Data dan Pemilihan Sampel

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang dipublikasikan di website resmi Bank Indonesia ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)) dan situs resmi perusahaan masing-masing. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dalam periode tahun 2011 – 2015 diperoleh 11BUS yang memenuhi kriteria dan dikali dengan 5 tahun menjadi 55 sample.

#### 3.2. Pengukuran dan definisi Operasional Variabel

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

- 1) *Islamic Governance Score(IG – Score) (X<sub>1</sub>)*  
IG Score diukur berdasarkan jumlah anggota dewan DPS, keberadaan anggota DPS dengan kualifikasi doktor dan keberadaan

ahli yang memiliki reputasi di dewan DPS (Kasmir, 2012).  
Ketentuannya sebagai berikut :

|                                               |                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Keberadaan anggota DPS                        | 1 jika bank memiliki DPS, 0 jika tidak                                         |
| Jumlah anggota DPS                            | 1 jika bank memiliki 3 atau lebih anggota, 0 jika kurang dari itu              |
| Keberadaan lintas anggota DPS                 | 1 jika ada, 0 jika tidak ada                                                   |
| Kualifikasi Doktor bagi anggota DPS           | 1 jika terdapat anggota DPS yang memiliki kualifikasi doktor, 0 jika tidak ada |
| Keberadaan ahli yang memiliki reputasi di DPS | 1 jika ada, 0 jika tidak ada                                                   |

2) *Investment Account Holders* (IAH) ( $X_2$ )

IAH (*Investment Account Holders*) dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio. Rasio tersebut diperoleh melalui perbandingan jumlah total dana syirkah temporer dengan modal disetor penuh (*fully paid-up capital*) pemegang saham (Kasmir, 2012).

$$IAH = \frac{\text{jumlah total dana syirkah temporer}}{\text{modal disetor penuh (fully paid-up capital) pemegang saham}}$$

3) Ukuran Perusahaan(SIZE) ( $X_3$ )

Ukuran perusahaan diukur dengan proksi natural logaritma dari total aset yang nilainya dapat diperoleh dari laporan posisi keuangan pada akhir periode dalam laporan tahunan perusahaan.

$$SIZE = \ln \text{ Total Assets}$$

3.2.1. *Variabel Terikat atau Dependent Variable (Y)*

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengungkapan CSR berdasarkan Indeks ISR. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis* berdasarkan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) terhadap isi dari laporan tahunan perusahaan sampel. Dalam ISR terdapat 53 item pengungkapan yang terbagi dalam 6 indikator yaitu investasi dan keuangan, produk dan jasa, tenaga kerja, sosial, lingkungan dan tata kelola perusahaan (Gustani, 2012). Dari setiap tema terdapat sub-tema pengungkapan yang secara keseluruhan berjumlah 53 (lima puluh tiga) sub-tema. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengungkapan Indeks ISR pada setiap tema ISR atau secara kumulatif digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks ISR} = \frac{\text{Jumlah point yang diungkapkan}}{\text{Jumlah skor maksimal}} \times 100\%$$

Setelah diketahui nilai indeks ISR pada tiap-tiap tema atau secara kumulatif, akan ditentukan predikat tingkat pengungkapan kinerja sosial masing-masing BUS. Dalam penilaian tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS, penulis menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Irwanto dalam Pramono (2005) dalam Munawaroh (2007) dimana skor pengungkapan diklasifikasikan dalam 4 kategori:

| <b>Predikat</b>   | <b>Nilai Indeks (%)</b> |
|-------------------|-------------------------|
| Sangat Informatif | 81 s.d. 100             |
| Informatif        | 66 s.d. < 81            |
| Kurang Informatif | 51 s.d. < 66            |
| Tidak Informatif  | 0 s.d. < 51             |

### **3.3. Metode Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan

teknik analisis analisis statistika deskriptif, dan analisis regresi data panel. Analisis statistika deskriptif dan analisis regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *software* Eviews versi 7.

## **IV. HASIL DAN DISKUSI**

Pada Grafik 1 berikut menunjukkan nilai indeks ISR secara kumulatif setiap tahun pada BUS diperoleh nilai rata-rata indeks ISR BUS Kumulatif. Nilai

rata-rata indeks ISR BUS ini untuk mengetahui tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS dari tahun 2011 sampai 2015.

variabel dependen tingkat pengungkapan CSR berdasarkan Indeks ISR menunjukkan nilai minimum sebesar 0.283019 dan nilai maksimum sebesar 0.849057, secara berturut-turut nilai tersebut dimiliki oleh Bank Victoria Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Serta rata-rata bank memiliki nilai CSR berdasarkan Indeks ISR sebesar 0.628816 dengan standar deviasi sebesar 0.139128.

Variabel DPS diproksikan menggunakan IG-Score yang diukur dari keberadaan DPS, jumlah DPS, *cross membership*, latar belakang pendidikan, dan pengalaman/reputasi dibagi yang mana menunjukkan nilai minimum sebesar 0.400000 dimiliki oleh Bank Syariah Bukopin, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Victoria Syariah, dan Panin Bank Syariah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 1.000000 dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Serta nilai rata-rata bank sebesar 0.607273 dengan standar deviasi sebesar 0.192310.

Variabel Investment Account Holders (IAH) diukur dari hasil bagi antara dana syirkah temporer dengan modal disetor penuh yang mana menunjukkan nilai minimum sebesar 0.210000 dimiliki oleh MyBank Syariah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 44.34000 dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Serta nilai rata-rata bank sebesar 11.23782 dengan standar deviasi sebesar 11.98083.

Variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang diukur dengan Ln of total assets yang mana menunjukkan nilai minimum sebesar 0.940000 dimiliki oleh MyBank Syariah. Sedangkan nilai maksimum sebesar 36.73000 dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia. Serta rata-rata nilai bank sebesar 9.399455 dengan standar deviasi sebesar 5.224969.

Pada tabel 2 menunjukan hasil perhitungan analisis regresi data panel

dengan menggunakan *software* Eviews versi 7.

Berdasarkan *output* pada tabel di atas, dapat dirumuskan persamaan regresi data panel sebagai berikut :

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\text{CSR} = 0.555753 - 0.033246\text{IGScore}_{it} + 0.006420\text{IAH}_{it} + 0.002246\text{SIZE}_{it} + V_{it}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari persamaan regresi tersebut dapat jelaskan bahwa :

1. Nilai *constant* sebesar 0.555753 menunjukkan bahwa variabel independen (IG Score, IAH, Size) pada observasi ke *i* dan periode ke *t* adalah konstan, maka pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR adalah 0.555753.

2. Jika nilai IGScore pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  naik sebesar 1% akan menurunkan pengungkapan CSR pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  sebesar 0.033246 apabila nilai variabel independen lainnya dianggap konstan.
3. Jika nilai IAH pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  naik sebesar 1% akan menaikkan pengungkapan CSR pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  sebesar 0.006420 dan nilai variabel independen lainnya dianggap konstan.
4. Jika nilai SIZE pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  naik sebesar 1% akan menaikkan pengungkapan CSR pada observasi ke  $i$  dan periode ke  $t$  sebesar 0.002246 apabila nilai variabel independen lainnya dianggap konstan.

#### **4.1. Pengaruh *Islamic Governance Score* Terhadap *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Indeks ISR ( $H_1$ )**

Berdasarkan hasil penelitian secara parsial yang telah dilakukan bahwa *Islamic Governance Score* (IG-Score) mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap CSR berdasarkan ISR. Dapat dilihat bahwa variabel *Islamic Governance Score* yang dinilai berdasarkan keberadaan anggota dewan pengawas syariah (DPS), jumlah anggota DPS, keberadaan lintas anggota DPS, kualifikasi doktor bagi anggota DPS, dan keberadaan anggota yang memiliki reputasi di DPS, memiliki hubungan yang tidak nyata terhadap tingkat pengungkapan CSR berdasarkan keseluruhan pengungkapan pada indeks ISR.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi utama DPS adalah mengarahkan, meninjau, dan mengawasi bank syariah serta harus memastikan bahwa bank syariah telah berjalan sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan fungsi tersebut, DPS tentunya dapat memberikan arahan yang lebih baik mengenai pertanggungjawaban sosial yang merupakan salah satu kepatuhan syariah. Semakin tinggi kepatuhan Bank Islam dalam mewujudkan *sharia governance* yang dalam hal ini adalah DPS maka tingkat pengungkapan CSR juga akan semakin besar (Sudaryati & Eskadewi, 2012).

IG Score tidak signifikan dikarenakan jumlah anggota DPS pada bank umum syariah rata-rata hanya memiliki dua orang anggota (lampiran 2). Menurut badan Internasional Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) setidaknya jumlah anggota DPS adalah tiga orang. Untuk itu, pihak bank umum syariah harus meningkatkan jumlah anggota DPS. Ini dikarenakan dengan jumlah anggota DPS yang besar maka pengawasan terhadap kegiatan dan pengungkapan tanggung jawab sosial menjadi lebih terkontrol. Selain itu, penyebab lainnya yaitu belum optimalnya peran dan fungsi DPS. Hal ini dikarenakan DPS hanya fokus terhadap persetujuan produk-produk, perhitungan dan pembayaran zakat serta kegiatan operasional lainnya, sehingga untuk pengawasan tanggung jawab social yang dilakukan kurang. Untuk itu, ada

baiknya DPS lebih menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Hasil penelitian penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik, Marlina dan Rafiqoh (2015) bahwa IG Score tidak memiliki pengaruh terhadap CSR berdasarkan ISR, Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Othman, R Thani, A, & Ghani (2009), Abdullah, W.A, Percy, M & Stewart, J (2011) dan Sudaryati (2012) mengungkapkan bahwa IG Score mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

#### **4.2. Pengaruh *Investment Account Holders* (IAH) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berdasarkan Indeks ISR**

Hasilnya dapat terlihat bahwa variabel IAH, memiliki hubungan yang nyata/korelasi positif terhadap tingkat pengungkapan CSR berdasarkan keseluruhan pengungkapan pada indeks ISR. Berarti semakin besar kemampuan BUS dalam menghimpun dana pihak ketiga maka total hasil scoring dari indeks ISR pada sebelas bank semakin tinggi, maka semakin banyak aktivitas CSR yang diungkapkan.. Selain itu nilai signifikansi 0,0009 lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan korelasi tersebut signifikan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel IAH memiliki hubungan positif (terdapat hubungan yang nyata) dan signifikan pada level 5% dengan tingkat pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR. Semakin banyak jumlah dana pihak ketiga, maka perusahaan dituntut untuk lebih banyak melakukan pengungkapan oleh stakeholders atas dana masyarakat yang dihimpunnya, karena pengelolaan dana pihak ketiga memiliki resiko yang cukup besar, apalagi DPK merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh sebagian besar atau bahkan di setiap bank. Hasil ini sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farook et al. (2011) dan Desiri (2011).

#### **4.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan (size) Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Berdasarkan Indeks ISR**

Hasil penelitian menunjukan uji t  $0.4459 > 0.05$  dengan arah positif. Artinya ukuran perusahaan (size) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR berdasarkan ISR suatu perusahaan, dengan demikian pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tidak terkait dengan besar kecilnya size dari perusahaan yang tercemin dalam total asset suatu perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Kurnianingsih (2015) dan Heni (2013). Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Othman, R, Thani, A, & Ghani (2009), Sari (2012), Lestari (2013). Mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan (size) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR.

#### **4.4. Pengaruh IG-Score, Investment Account Holders (IAH), ukuran perusahaan (size) Secara Bersama-sama Terhadap Tingkat pengungkapan CSR berdasarkan Indeks ISR**

Berdasarkan hasil *Eviews0.7* diketahui nilai F hitung sebesar 6.098862 sementara F tabel dengan tingkat  $\alpha = 5\%$ , dan  $df_1(k-1) = 3$  dan  $df_2(n-k) = 51$ , didapat F tabel sebesar 2.79. Dengan demikian F hitung  $>$  F tabel. Kemudian dari tabel diatas terlihat nilai prob (F statistic) sebesar 0.001256 yang berarti memiliki nilai dibawah alpha 0,05, sehingga dapat disimpulkann bahwa hipotesis  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel *IG score*, *Invesment Account Holder* dan *Size* secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

### **V. PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sharia governance structure terhadap pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah :

1. Berdasarkan hasil analisis perhitungan CSR berdasarkan indeks ISR pada BUS dari tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat pengungkapan kinerja sosial BUS di Indonesia masih Kurang Informatif dengan presentase nilai indeks di antara 51% - <66%. Namun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.
2. Secara Simultan, hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara *Islamic Governance Score* (IG Score), *Invesment Account Holders* (IAH) dan ukuran perusahaan (SIZE) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bank umum syariah tahun 2011-2015. Nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 22,07% menunjukkan bahwa kontribusi *Islamic Governance Score* (IG Score), *Invesment Accout Holders* (IAH) dan ukuran perusahaan (SIZE) dan 77,93% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Secara parsial, *sharia governance structure* yang diproksikan dengan variabel *Invesment Accout Holders* (IAH) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan indeks ISR pada bank umum syariah tahun 2011-2015. Hal ini menunjukkan bahwa jika IAH naik maka pengungkapan CSR akan mengalami kecenderungan untuk naik. Sedangkan *sharia governance structure* yang diproksikan dengan variabel IG Score dan ukuran perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan indeks ISR pada bank umum syariah tahun 2011-2015.
4. Variabel yang paling dominan mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bank umum syariah tahun 2011-2015 adalah

variabel *Invesment Account Holders* (IAH) dengan konstanta 0,006420. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh *Invesment Account Holders* (IAH) terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) bank umum syariah tahun 2011-2015. Sehingga dengan meningkatnya *Invesment Account Holders* (IAH) akan meningkatkan pengungkapan CSR berdasarkan indeks ISR.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Alqur'an dan Hadist

Agustani dan Anggraeni. 2012. Peranan *Corporate Social Responsibility* Dalam Mengimplementasikan *Good Corporate Governance*. Jurnal Forum Bisnis & Keuangan 1.

Farook dan Lanies. 2005. *Banking on Islam? Determinants of CSR Disclosure. International Conference on Islamic Economi and Finance*.

Farook dan Lanies. 2011. *Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure : the case of Islamic Banks*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 114-141.

Fitria, Soraya dan Dewi Hartanti. 2010. Islam dan Tanggung Jawab Sosial : Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan *Global Reporting Initiative Index* dan *Islamic Social Reporting Index*. Simposium Nasional Akuntansi XIII 2010. Semarang : Universitas Jenderal Sudirman.

Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta. Graha Ilmu

Haniffa. 2002. *Social Reporting Disclosure An Islamic Perspective*. Indonesian Management Accounting Research, Vol.1 No.2, 128-146

Othman, R, Thani, A & Ghani. 2009. *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*. *Research Journal of International Studies – Issue 12*.

Rustiarini, Ni Wayan. 2010. Pengaruh Corporate Governance pada hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan. Universitas Mahasaraswati Denpasar. SNA XIII. Purwokerto.

Suharto, dkk. 2001. Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah. Jakarta : Djambatan.

Yusuf, Muhammad Yasir. 2010. Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah : Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Maal Aceh. Jurnal Ekonomi Islam – La Riba Vol. IV No. 2.